

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki wilayah yang luas serta kaya akan sumber daya alam, tentunya memiliki potensi alam yang melimpah yaitu hasil pertambangan, pertanian, hingga sektor-sektor lainnya yang menjadi modal penting dalam memajukan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, baik dari segi materi maupun spiritual, guna mencapai sasaran nasional yang telah ditetapkan (Purwanti, 2023). Pembangunan desa merupakan aspek terpenting dalam mencapai target pembangunan nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia bermukim di wilayah pedesaan.

Salah satu indikator status negara berkembang di Indonesia dapat dilihat dari tingginya tingkat kemiskinan, khususnya di wilayah pedesaan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat (Sari & Tukiman, 2023). Diantaranya penyebab kemiskinan adalah kesenjangan tingkat pendidikan, tingginya kebutuhan pokok, perbedaan akses sumber daya, dan distribusi pendapatan yang tidak merata akibat terbatasnya lapangan kerja. Menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistika (BPS) Tahun 2024, Penduduk Miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta atau 9,03 persen. Kemiskinan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh daerah pedesaan sebesar 13,58 sedangkan kemiskinan di perkotaan berjumlah 11,64. Dapat dilihat berdasarkan angka kemiskinan di suatu wilayah menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antara Desa dan Kota. Akibat rendahnya perekonomian oleh karena

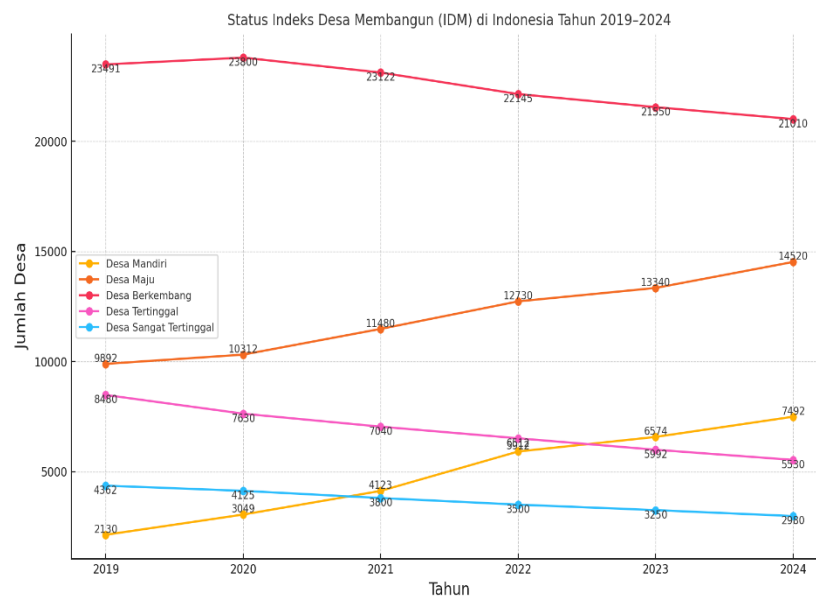
itu, pemerintah diharapkan mampu melakukan berbagai upaya pembangunan nasional, terutama yang ditujukan bagi wilayah pedesaan guna mengurangi kesenjangan tersebut melalui program-program yang bertujuan mengentaskan kemiskinan (Luctiana & Rahayu, 2023).

Pemerintah Indonesia mengurangi kemiskinan dengan program pemberdayaan masyarakat pedesaan untuk menciptakan kemandirian dengan memanfaatkan potensi lokal. Pemberdayaan ini bertujuan agar masyarakat tidak bergantung pada bantuan pemerintah, melainkan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri (Ristiana & Yusuf, 2020). Menurut Mardikanto dan Soebianto (2017), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memperluas peluang, mendorong semangat, serta meningkatkan kapasitas masyarakat agar dapat berperan aktif dalam pembangunan serta memaksimalkan potensi yang dimiliki terutama bagi mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi masyarakat desa dengan memberikan kewenangan kepada desa dalam mengurus urusan mereka sendiri, guna mengembangkan potensi daerah secara mandiri. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang otonomi desa, disarankan agar setiap desa memiliki organisasi komersial, atau lembaga usaha ekonomi yang dapat membantu terpenuhinya kebutuhan warga desa, khususnya dalam hal kebutuhan dasar dan pemanfaatan sumber daya yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, serta sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan potensi yang ada di Desa. Maksud peraturan tersebut adalah perwujudan memperbaiki kenyamanan masyarakat menjadi lebih sejahtera.

Berdasarkan permendesa Nomor 2 Tahun 2016 memberikan pedoman untuk mencapai target pembangunan desa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu cara untuk menilai kemajuan dan kemandirian desa adalah dengan menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), yang membantu mengidentifikasi status desa dan menilai tingkat kemajuan serta kemandiriannya. Berdasarkan IDM, desa dikategorikan dalam lima status: Desa Mandiri, Desa Maju, Desa Berkembang, Desa Tertinggal Dan Desa Sangat Tertinggal (Bachrudin & Darma, 2020). Berikut data status Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada tahun 2019-2024 :

Gambar 1. 1 Data Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Indonesia pada Tahun 2019-2024



Sumber: <https://idm.kemendes.go.id> (2024).

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa desa dengan status IDM sebagai desa berkembang mendominasi dari tahun 2019 hingga 2024. Selama periode ini, jumlah desa mandiri dan desa maju terus meningkat setiap tahun, sementara kategori desa berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal mengalami fluktuasi. Dalam upaya memperkuat perekonomian lokal, Pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang memaksimalkan potensi lembaga, sumber daya alam, dan tenaga kerja lokal. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperkuat peran desa melalui forum Musyawarah

Desa (Sugiarta, 2023). Dengan membentuk BUMDes, diharapkan dapat mengembangkan sektor ekonomi desa secara lebih efektif dan menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan dan kemajuan desa.

BUMDes adalah lembaga yang didirikan oleh pemerintah desa bersama masyarakat agar dapat meningkatkan perekonomian di desa. BUMDes mendukung program pembangunan desa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, yang mengatur pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi, serta penyediaan layanan publik, serta untuk kemakmuran penduduk desa dapat menyediakan bentuk usaha lainnya. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa Nomor 174 Tahun 2023, tercatat 2.800 desa berstatus mandiri, 3.674 desa maju, dan 1.247 desa berkembang. Hal ini sejalan dengan informasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengenai BUMDes pada tahun 2023 di artikel suara surabaya.net diperoleh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait BUMDes sebagai berikut :

“Gubernur Khofifah mengungkapkan bahwa di Jawa Timur telah terbentuk 6.490 BUMDes, terdiri dari 1.400 BUMDes kategori maju, 2.353 kategori berkembang, dan 2.737 kategori pemula. Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membangun dan memberdayakan masyarakat desa dilakukan melalui berbagai program dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Kehadiran BUMDes diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa.”
(Sumber : <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/jatim-punya-2-800-desamandiri-tertinggi-di-indonesia/> di akses pada tanggal 26 Maret 2024 10.45 WIB)

Berdasarkan berita tersebut, keberadaan BUMDes bertujuan untuk memanfaatkan potensi yang ada di desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai kemandirian desa. BUMDes berperan sebagai penggerak ekonomi desa yang mengoptimalkan sumber daya lokal untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD). Diharapkan, hal ini dapat mendukung pembiayaan

pembangunan desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun setiap tahun, serta berkontribusi pada perekonomian desa melalui berbagai unit usaha yang dikelola.

Sebagai lembaga ekonomi desa, BUMDes sudah semestinya memperhatikan kepentingan masyarakat melalui penyedia barang dan jasa atau wadah dalam mencari keuntungan. Kehadiran BUMDes bisa mewujudkan desa lebih mandiri selaku lembaga yang menampung dan menumbuhkan kesejahteraan masyarakat desa melalui aktivitas perekonomiannya berdasarkan ciri dan karakteristik khas (Tyas & Hertati, 2023). Oleh sebab itu, terdapatnya BUMDes di setiap Kabupaten/Kota dapat berkembang dan membenahi ekonomi desa dengan berbagai unit usaha desa yang dikelolanya, sehingga bisa berdampak pada meningkatnya pendapatan asli daerah/desa dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Salah satunya adalah Kabupaten Gresik yang sebagian besar wilayahnya adalah pedesaan dan masyarakatnya tinggal di desa. Hal ini menjadikan mayoritas masyarakatnya bekerja pada sektor pertanian karena kondisi alamnya yang masih baik. Namun, diketahui bahwa sekitar dua pertiga penduduk di negara-negara berkembang berkategori miskin dengan menggantungkan hidupnya pada pola pertanian, baik petani kecil maupun buruh tani yang berpenghasilan rendah (Hamid, 2018). Hal tersebut juga dapat dilihat bahwa berdasarkan data BPS persentase penduduk miskin di Kabupaten Gresik pada tahun 2023 meningkat 0,9 persen dan pada 2024 meningkat lagi sebanyak 0,11 persen. Fenomena tersebut menjadikan dorongan bagi pemerintah Kabupaten Gresik berusaha mencari pemecahan dalam

menaikkan kemampuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya dengan terkelolanya potensi desa-desa melalui monitoring dan evaluasi.

Pendirian BUMDes di Provinsi Jawa Timur, termasuk di Kabupaten Gresik adalah langkah pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa dan memperkuat kemandirian masyarakat. Hal ini tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gresik Tahun 2021-2024, yang menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas pembangunan. Tujuan RPJMD ini adalah untuk meningkatkan kemandirian masyarakat pedesaan dengan mengembangkan kelompok usaha ekonomi dan menambah jumlah BUMDes yang aktif beroperasi. Daftar BUMDes di Kabupaten Gresik berdasarkan kecamatan dapat dilihat melalui tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1. 1 Daftar BUMDes Kabupaten Gresik

No	Kecamatan	Jumlah Desa		
		kelurahan	Desa	BUMDes
1	Balongpanggang	-	25	15
2	Benjeng	-	23	13
3	Bungah	-	22	22
4	Cerme	-	25	25
5	Driyorejo	-	16	16
6	Duduk Sampeyan	-	23	23
7	Dukun	-	26	26
8	Gresik	16	5	5
9	Kebomas	10	11	11
10	Kedamean	-	15	15
11	Menganti	-	22	22
12	Manyar	-	23	23
13	Panceng	-	14	14
14	Sangkapura	-	17	17
15	Sidayu	-	21	21
16	Tambak	-	13	13
17	Ujung Pangkah	-	13	13
18	Wringinanom	-	16	17
Jumlah		26	330	298

Sumber: Dinas PMD Kabupaten Gresik, 2024

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (DPMD) Kabupaten Gresik, pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Gresik terdapat 330 desa yang terdaftar dan 298 memiliki BUMDes. Dalam perkembangannya, BUMDes diklasifikasikan ke dalam tiga kategori berdasarkan kemajuan yakni Pemula, Berkembang dan Maju. Jumlah BUMDes yang mendapatkan kategori maju pada Kecamatan Menganti ialah sebanyak 22 BUMDes yang sudah mencakup semua total desa yang ada di Kecamatan Menganti. Salah satunya adalah Desa Pelemwatu yang berlokasi di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik yang mempunyai BUMDes dengan kategori maju dan telah berdiri sejak tahun 2017. Pemeringkatan Kategori tersebut didasarkan pada tingkat pengorganisasian BUMDes yang terus berkembang selama periode tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pendirian, Pengembangan dan Pemeringkatan, pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu BUMDes dengan kategori maju di Kecamatan Menganti adalah BUMDes “Pelemwatu Mandiri”. BUMDes ini didirikan berlandaskan peraturan Desa Pelemwatu Nomor 4 Tahun 2017 tentang pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pelemwatu Mandiri, Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Menurut Bapak Setyo selaku Direktur BUMDes menjelaskan bahwa pengelolaan BUMDes ini bergerak di bidang ekonomi dengan 4 unit usaha yang dikelolanya meliputi usaha bersama yaitu Unit Persewaan, unit usaha wisata, unit beras BUMDes dan unit simpan pinjam. Keberhasilan BUMDes Pelemwatu

Mandiri dalam mengelola unit usahanya tidak terlepas atas binaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD).

Pengelolaan unit usaha yang terkelola dengan baik terlihat pada unit usaha Wisata. Penetapan Desa Wisata Pelemwatu sebagai salah satu unit usaha BUMDes telah menjadikannya destinasi wisata yang cukup populer di Kecamatan Menganti. Pada tahun 2021, Desa Wisata Pelemwatu berhasil meraih posisi sebagai TOP 10 finalis produk unggulan BUMDes di Kabupaten Gresik pada Festival Dewi Jatim 2022. Selain itu, desa ini juga mendapatkan penghargaan East Java Tourism 2022 untuk video profil desa wisata terbaik, dan masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata (ADWI) 2023, seperti dalam artikel oleh radargresik.jawapos.com sebagai berikut :

“Desa Wisata Pelemwatu di Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, berhasil masuk dalam 300 besar Anugerah Desa Wisata (ADWI) 2023. Desa ini memiliki 40 usaha UKM, serta agrowisata Pelemsewu, wisata religi, dan wisata telaga. Konsep pembangunan desa wisata di Gresik menekankan kemandirian, kelestarian lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi daerah”
(Sumber: <https://radargresik.jawapos.com/kota-gresik/83941062/desa-wisata-di-gresik-ini-masuk-kategori-300-besar-adwi-2023>)

Penghargaan tersebut menunjukkan keberhasilan desa dalam mengelola unit usaha secara lebih baik. Selain itu, penghargaan ini menunjukkan kemajuan signifikan dalam memberdayakan masyarakat, sejalan dengan tujuan utama BUMDes untuk menciptakan sumber ekonomi lokal yang baru (Farid, 2021). BUMDes Pelemwatu Mandiri memiliki peran yang penting sebagai perantara dalam memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan usaha di tingkat desa. BUMDes Pelemwatu Mandiri berperan sebagai penghubung antara usaha-usaha masyarakat. Diantaranya BUMDes

Pelemwatu Mandiri melalui penyediaan simpan pinjam dengan maksud agar dapat menunjang kebutuhan modal usaha bagi masyarakat. Selain itu juga terdapat usaha persewaan ruko di sekitar area objek wisata untuk kemudahan bagi masyarakat apabila ingin memulai usaha. Adapun hasil pendapatan masyarakat yang dibuktikan pada setiap unit usaha BUMDes Pelemwatu Mandiri Per-tahun, sebagai berikut :

Tabel 1. 2 Pendapatan Hasil Unit Usaha yang dikelola Oleh BUMDes Pelemwatu Mandiri

No	Unit Usaha	Pendapatan Tahun 2022	Pendapatan Tahun 2023	Pendapatan Tahun 2024
1	Unit Persewaan	Rp. 9.800.000	Rp. 17.800.000	Rp. 15. 800.000
2	Unit Usaha Wisata	Rp. 15.000.000	Rp. 19.000.000	Rp. 28. 600.000
3	Unit Produk Beras BUMDes	Rp. 1.650.000	Rp. 3.650.000	Rp. 7. 650.000
4	Unit Simpan Pinjam	Rp. 12.000.000	Rp. 18.000.000	Rp. 25.000.000

Sumber: Sekretariat Badan Usaha Milik Desa, (2024)

Berdasarkan uraian tabel 1.2 dapat diketahui bahwa unit usaha wisata BUMDes Pelemwatu Mandiri memperoleh pemasukan yang tertinggi setiap tahunnya dibandingkan unit usaha lainnya. Meningkatnya pendapatan hasil Unit usaha setiap tahunnya juga berkat dari dukungan pemerintah setempat. Berdasarkan hasil peninjauan, diungkapkan oleh Bapak Setyo selaku direktur BUMDes dengan terbentuknya unit usaha lainnya, terutama Unit Usaha Wisata merupakan induk unit usaha yang telah memberikan kontribusi dalam menyediakan lapangan pekerjaan. Pemberdayaan masyarakat selalu dihubungkan dengan implementasi kegiatan pengembangan yang bersifat produktif, sehingga mampu memperbaiki pendapatan. Ketika pemberdayaan masyarakat dilakukan perlunya memperhatikan hal-hal penting, Menurut Mardikanto & Soebianto (2017:114) merumuskan adanya (1) Bina Manusia, ialah mengutamakan terciptanya kesejahteraan masyarakat atau

peningkatan kualitas hidup. Seperti: penguatan dan pengembangan kapasitas individu, kelembagaan dan kapasitas jejaring. (2) Bina Usaha, yakni melibatkan pemilihan jenis usaha, pendirian badan usaha serta pengembangan infrastruktur dan sarana pendukung. (3) Bina Lingkungan, khususnya upaya untuk melindungi, pelestarian lingkungan hidup maupun sumber daya alam. (4) Bina Kelembagaan, yakni penguatan penyediaan kelembagaan atau organisasi sosial agar dapat berjalan secara efektif membantu terselenggaranya bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aset terpenting dalam keberhasilan pelaksanaan program yang dijalankan oleh BUMDes untuk mengembangkan Desa Pelemwatu agar menjadi lebih inovatif (Ahmad, 2020). Berdasarkan keempat rumusan tersebut, BUMDes Pelemwatu Mandiri mengalami beberapa kendala yang menyebabkan proses pemberdayaan masyarakat masih belum maksimal. Hal ini disebabkan kualitas sumber daya manusia yang terbatas di kalangan penduduk desa. Terkait terciptanya Bina Manusia, dengan memprioritaskan pada terciptanya kesejahteraan masyarakat dan perbaikan mutu sumber daya manusia melalui pelatihan rutin dan pembinaan. Namun, penerapan hasil pelatihan oleh masyarakat masih belum berjalan secara optimal. Hal ini disampaikan oleh Bapak Kasiroh selaku pengurus BUMDes yang menerangkan bahwa:

“Sebenarnya masyarakat sini itu sudah pernah mendapatkan pelatihan, namun karena tidak ada tindak lanjut yang memadai pelaksanaannya menjadi kurang berjalan optimal dan tidak berlanjut secara efektif mba. Kami saat ini belajar secara otodidak sementara hanya pengelola aktif yang mengikuti pelatihan khusus”. Minggu, 25 Juni 2024.

Selanjutnya, dalam aspek kedua Bina Usaha, Pengembangan desa tidak hanya bergantung pada kinerja BUMDes “Pelemwatu Mandiri” dalam mengelola

dan membangun unit usaha, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat yang perlu diberdayakan agar pengelolaan dapat berjalan secara lebih optimal. Namun, Kurangnya kegiatan sosialisasi juga salah satu kendala yang dihadapi, terutama bagi para pelaku usaha lokal yang belum sepenuhnya memahami pentingnya pengembangan produk untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut membatasi kontribusi mereka dalam pengembangan usaha desa. Disebabkan oleh minimnya kesadaran akan pentingnya pendidikan formal Akibatnya, kualitas sumber daya manusia di desa menjadi rendah dan berdampak pada efektivitas pemberdayaan masyarakat, Khususnya di sektor ekonomi (Solihat & Julia, 2022). Hal ini disampaikan oleh Bapak Setyo selaku Direktur BUMDes yang menjelaskan bahwa:

“Kalo kualifikasi khusus buat ngelola unit usaha BUMDes, memang harus warga yang berdomisili Desa Pelemwatu dan memiliki minimal ijazah SMA atau Sederajat mba. Jadi yang bisa mendaftar yang punya ijazah SMA. Tapi ya gitu mbak saat ini banyak masyarakat jadi pedagang atau punya usaha dibidang produksi oleh-oleh belum ada izin BPOM-nya. Dan untuk kemasan produk mereka masih sangat sederhana”. Minggu, 25 Juni 2024.

Dilansir dari website <https://desapelemwatu.gresikkab.go.id/>, diketahui bahwa sebagian besar mayoritas penduduk Desa Pelemwatu memiliki pendidikan pada tamatan sekolah dasar (SD) dengan jumlah mencapai 1640 orang atau persentase sebesar 30,79% dari total penduduk sebesar 5236 orang. Tamatan SLTP/ sederajat sebesar 13,29% (708 orang) dan tamatan SLTA/ sederajat sebesar 18,87% (1005 orang). Sebagaimana kita ketahui pendidikan memegang peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat karena dapat meningkatkan kapasitas individu maupun kelompok. Terlebih, syarat utama untuk bergabung dalam operasional BUMDes adalah tamatan SMA/ Sederajat, sedangkan masyarakat

penduduk desa didominasi dengan lulusan SD. Sebagaimana yang disebutkan oleh Hamid (2018) kurangnya kualitas sumber daya manusia dapat berdampak pada kemampuan suatu daerah untuk mandiri dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada aspek yang ketiga yaitu bina lingkungan, dalam hal ini untuk melakukan perlindungan, pelestarian, dan pemeliharaan, dan pemulihan lingkungan hidup maupun sumber daya alam. Pembinaan terhadap lingkungan merupakan salah satu poin penting dalam memberdayakan masyarakat, mengingat Tanggung jawab menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembinaan terhadap lingkungan bukan hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga pembinaan lingkungan secara fisik yang melibatkan pengelolaan sarana dan prasarana untuk memaksimalkan serta mengoptimalkan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Di Telaga Pelemwatu yang sebelumnya tercemar oleh tumpukan sampah telah berhasil diubah oleh BUMDes menjadi bagian dari Desa Wisata Pelemwatu. Proses pembersihan dan pemeliharaan lingkungan tersebut dilakukan oleh anggota Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS), Karang Taruna dan masyarakat setempat. Desa Pelemwatu saat ini memiliki lingkungan yang cukup baik, dan penting bagi masyarakat untuk menjaga keasrian dan merawat lingkungan tersebut. Khususnya di area wisata sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 dibawah ini:



Gambar 1. 2 Kondisi Lingkungan di Area Desa Wisata Pelemwatu

Sumber: dokumentasi penulis, 2024

Aspek yang keempat adalah bina kelembagaan menjadi hal yang berpengaruh terhadap berjalannya seluruh kegiatan yang terkait dengan manusia, usaha dan lingkungan. Kelembagaan yang efektif menjadi penentu keberhasilan dari tujuan awal pembentukan lembaga. BUMDes Pelemwatu Mandiri dalam hal ini merupakan sebuah lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk rakyat sebagai upaya dalam mendorong pemberdayaan masyarakat. Pada dasarnya, pemberdayaan masyarakat seringkali mengacu pada penguatan perekonomian sebagai bentuk pengentasan kemiskinan, namun pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang penting dalam menciptakan kemandirian desa. Hal ini memberikan dampak positif bagi berbagai unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Pelemwatu Mandiri. Melihat beberapa kendala yang ada pada BUMDes saat ini perlunya penguatan kelembagaan atau organisasi sosial untuk terus memantau dan mengedukasi agar berjalan efektif untuk dapat mendukung terselenggaranya bina manusia, bina usaha, dan bina lingkungan.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha**

Milik Desa “Pelemwatu Mandiri” Di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan adanya latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Pelemwatu Mandiri” di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan tentang proses Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Pelemwatu Mandiri” di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk meningkatkan pengetahuan dan literatur peneliti selanjutnya dalam melaksanakan penelitian sejenisnya serta dapat menambah bacaan ilmiah di perpustakaan khususnya pada Fakultas Ilmu Sosial, Budaya dan Politik.
 - b. Pada penelitian ini diharapkan untuk melengkapi pemahaman tentang pemberdayaan masyarakat sebagai sumber referensi tambahan yang berharga bagi penulis dan pembaca, serta juga diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan atau pengetahuan mengenai Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa “Pelemwatu Mandiri” Di Desa Pelemwatu Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Selain itu, diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi yang berguna untuk penelitian di masa depan dan mampu digunakan untuk bahan dalam mempraktikkan teori atau pengetahuan yang didapatkan saat bangku perkuliahan.

b. Bagi Desa Pelemwatu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, rekomendasi, dan masukan bagi pemerintah desa serta BUMDes Pelemwatu dalam proses pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan Desa Pelemwatu mampu bersaing di sektor pariwisata, mempertahankan keberadaannya, dan memberikan dampak positif, terutama dalam bidang ekonomi, bagi masyarakat Desa Pelemwatu dan desa lainnya. Sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai pedoman evaluasi dalam pengelolaan BUMDes dan Operasional lainnya.

c. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Sebagai bahan referensi yang dapat digunakan sebagai acuan oleh peneliti lainnya yang ingin mengembangkan kajian serupa di masa mendatang, serta dapat menambah referensi perpustakaan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya Fakultas Ilmu Sosial, Budaya, dan Politik Program Studi Administrasi Publik